

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Desa Ngindeng adalah desa yang terletak di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dengan luas wilayah 44,452 Ha dengan mempunyai 4 kedukuhan yaitu Dukuh Krajan, Dukuh Ngindeng I, Dukuh Ngindeng II, dan Dukuh Bendo. Pada setiap Kedukuhan mempunyai RT dan RW, Dukuh Krajan mempunyai RT dengan jumlah 7 dan mempunyai RW dengan jumlah 3, selanjutnya Dukuh Ngindeng I mempunyai RT dengan jumlah 5 dan mempunyai RW dengan jumlah 2, kemudian Dukuh Ngindeng II mempunyai RT dengan jumlah 4 dan mempunyai RW dengan jumlah 2 sedangkan Dukuh Bendo mempunyai RT dengan jumlah 6 dan mempunyai RW dengan jumlah 3.

Desa Ngindeng juga mempunyai tempat yang dijadikan untuk destinasi wisata yaitu wisata Waduk Bendo dan Rumah Singgah Jenderal Sudirman. Tempat wisata Waduk Bendo ini berada di Dukuh Bendo yang masih dalam tahap pembangunan dan Destinasi Rumah Singgah Jenderal Sudirman berada di Dukuh Ngindeng I tepatnya di salah satu rumah warga Masyarakat Dukuh Ngindeng I. Wisata Waduk Bendo adalah bendungan masih dalam tahapan pembangunan sejak tahun 2013 sampai sekarang masih belum terselesaikan, sebenarnya ditarget sampai dengan tahun ini. Sedangkan Destinasi Rumah Singgah Jenderal Sudirman ini adalah tempat persinggahan atau tempat beristirahatnya seorang Jenderal besar yaitu Jenderal Sudirman, pada saat itu Jenderal Sudirman tengah menghadapi perang gerilya melawan pasukan belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia pada tahun 1948 silam. Rumah singgah ini berada di salah satu rumah masyarakat Desa Ngindeng yang terletak di Dukuh Ngindeng I. Hingga kini benda bekas

Jenderal Sudirman hingga saat ini masih dirawat bagus dan Rumah Singgah Jenderal Sudirman ini sering kedatangan tamu baik dari angkatan darat maupun masyarakat lainnya yang mengetahui tempat persinggahan ini.

Desa Ngindeng ini bukan desa yang tertinggal, Desa Ngindeng sekarang ini sudah mulai berkembang dari segi apapun dan sudah bisa memuntaskan kemiskinan dan pengangguran. Dengan berkembangnya Desa Ngindeng sudah mendirikan BUMDes untuk membantu menghidupkan atau mengembangkan peluang-peluang yang ada sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa, dapat mensejahterakan masyarakat dan dapat membantu perekonomian masyarakat. BUMDes ini didirikan pada tahun 2016 yang bernama “Margo Mulyo”.

Pembangunan desa pada saat ini merupakan poros kemandirian yang dapat membuat perekonomian disuatu bangsa dapat dikatakan baik. Dengan adanya kemajuan ekonomi yang terjadi di perdesaan yang kuat dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas.(Fitriska, 2017)

Untuk mewujudkan desa yang mandiri, maka sangat diperlukan sumber pendapatan bagi desa yang berasal dari suatu desa tersebut. Kemandirian yang dimaksudkan adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sesuai kemampuan yang dimiliki. Dalam mendorong pembangunan ditingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada ditingkat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat menjadi BUMDes.(Fitriska, 2017).

Pengelolaan adalah suatu kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.(Prajudi Atmosudirdjo, 1982).

Arti pengelolaan adalah soft skill atau ketrampilan untuk mencapai suatu keberhasilan tertentu dengan menggunakan tenaga atau pun bantuan orang lain. (Sondang P. Siagian, 1997).

BUMDes merupakan elemen dan instrument penggerak ekonomi masyarakat desa. BUMDes harus dipahami dan dilakukan secara maksimal. BUMDes menjadi pusat perekonomian masyarakat desa untuk menumbuh kembangkan ekonomi lokal. Keberadaan BUMDes adalah untuk memperkuat ekonomi rakyat yang berada di suatu desa. (Sutoro Eko, dkk. 2015). Selain itu BUMDes juga sebagai instrumen otonomi desa yang maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desanya, sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat yaitu dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan BUMDes serta sebagai suatu program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.(Fitriska, 2017)

BUMDes menjadi hak suatu desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama dalam hal meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan untuk masyarakat desa.(Chikamawati, n.d.). UU Desa dalam rangka pembangunan pada aspek perkonomian desa tersebut mengatur adanya badan usaha yang dimiliki oleh desa. Meskipun substansi yang mengenai badan usaha milik desa (BUMDes) bukanlah hal yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan desa, namun pada aspek kemandirian, UU Desa memberi penekanan

yang lebih. Kemandirian yang dimaksud adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuannya sendiri.(Ridlwan & Unila, n.d.). BUMDes adalah suatu bentukpartisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.(Kushartono, n.d.)

Definisi yang dicantumkan pada BUMDes dalam UU Desa yaitu badanusaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kalimat “untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat” adalah tujuan akhir didirikannya BUMDes. Tujuan ini tentu terdapat pada semua pemerintah desa yang sangat melekat, karenanya pengetahuan yang baik akan BUMDes tentu menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Keinginan untuk membentuk suatu BUMDes tanpa modal pemahaman yang baik akan pembentukan dan pengelolaannya, justru dapat menjadikan desa lebih jauh dari kata “sejahtera”. Sebab, kekayaan didesa yang dijadikan modal BUMDes kemungkinan bisa saja tidak berkembang bahkan hingga mengalami kerugian.(Ridlwan & Unila, n.d.)

BUMDes ini diharapkan juga mampu mendorong dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset perekonomian yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat dan kebersamaan sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaan- nya.(Ramadana & Ribawanto, 2010)

BUMDes “Margo Mulyo” di Desa Ngindeng ini memang sudah mulai berkembang cukup bagus dari awal terbentuknya hingga sekarang ini. Jumlah unit

usaha yang dijalankan saat ini juga sudah banyak dan bervariasi. Dari usaha Foto copy dan ATK, Penyedia produk air Mineral Amides, Agen BRI link, PPOB (Payment Point Online Bank) dan unit usaha yang masih baru yaitu Persewaan atau Rentalan Tenda buat camping. Unit usaha ini dikelola oleh Pengurus BUMDes “Margo Mulyo” yang ada di Desa Ngindeng.

Sebagaimana yang telah tercantum pada Peraturan Desa Ngindeng No. 7 Tahun 2016 menjelaskan tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa adalah : a) Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa; b) Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mewujudkan kelemagaan yang tangguh dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat; c) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat;d) Mengoptimalkan pengembangan potensi desa; e) Membuka lapangan kerja.

Pada umumnya perekonomian yang ada di Desa itu memang dari sektor pertanian. Tentunya hal ini bisa yang menjadikan daya tarik tersendiri bagi Desa Ngindeng ini. Kreativitas masyarakat menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan taraf perekonomian. Produk-produk yang dibuat oleh masyarakat Desa Ngindeng sendiri selanjutnya dijadikan BUMDes sehingga bisa dikembangkan dan dipasarkan menjadi lebih baik lagi apabila dikelola dengan baik. Apabila BUMDes mengelolanya dengan baik maka akan meningkatkan perekonomian masyarakat serta bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dalam skripsi ini penulis ingin mengkaji terkait dengan **“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Margo Mulyo” Di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.**

### **1.2.Rumusan Masalah**

1. Bagaimana awal pembentukan BUMDes “Margo Mulyo” ini?
2. Bagaimana strategi pengelolaan dalam meningkatkan kualitas BUMDes “Margo Mulyo” ini?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes “Margo Mulyo”?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui awal pembentukan BUMDes “Margo Mulyo”
2. Untuk mengetahui strategi pengelolaan dalam meningkatkan kualitas BUMDes “Margo Mulyo”
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes “ Margo Mulyo”

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh wawasan dan memperluas pengetahuan yang lebih mendalam tentang BUMDes ” Margo Mulyo” dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Margo Mulyo” di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwadengan dibentuknya BUMDes “ Margo Mulyo” ini adalah dapat mendorong pembangunan ditingkat desa secara mandiri, untuk kesejahteraan masyarakat, dan untuk Peningkatan PADes.

### 1.5.Penegasan Istilah

#### 1.5.1. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan sebuah pelaksanaan melalui fungsi-fungsi manajemen sebagai proses penataan suatu kegiatan yang berguna untuk menjadi tolak ukur untuk menentukan bentuk keberhasilan sebagai kesepakatan dari suatu pencapaian tujuan bersama. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai proses perencanaan dan pengambilan organisasi manusia, fisik, keuangan dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.(HW, 2019)

#### 1.5.2. BUMDes

BUMDes merupakan elemen dan instrument penggerak ekonomimasyarakat desa.BUMDes harus dipahami dan dilakukan secara maksimal.BUMDes menjadi pusat perekonomian masyarakat desa untuk menumbuhkembangkan ekonomi lokal.Keberadaan BUMDes adalah untuk memperkuat ekonomi rakyat desa. (Sutoro Eko, dkk. 2015). Selain itu BUMDes juga sebagai instrumen otonomidesa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan sebagai

instrumen kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan BUMDes serta sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.(Fitriska, 2017)

## 1.6. Landasan Teori

### 1.6.1. Pegelolaan

Pengelolaan merupakan sebuah pelaksanaan melalui fungsi-fungsi manajemen sebagai proses penataan suatu kegiatan yang berguna untuk menjadi tolak ukur untuk menentukan bentuk keberhasilan sebagai kesepakatan dari suatu pencapaian tujuan bersama. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai proses perencanaan dan pengambilan organisasi manusia, fisik, keuangan dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.(HW, 2019)

Menurut George Terry dalam bukunya *Principles of Management* kita bisa melihat berdasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) diatas maka dapat disampaikan bahwa tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam melakukan manajemen yaitu meliputi :

#### 1. Perencanaan (Planning)

Dalam setiap pelaksanaan suatu kegiatan untuk meletakkan strategi yang akan ditempuh selama melaksanakan kegiatan tersebut, perencanaan menduduki tempat yang sangat penting. Perencanaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai, apa yang harus dilakukan, dan siapa pelaksana langkah untuk mencapai suatu tujuan tersebut.

## 2. Pengorganisasian (Organization)

Kegiatan pengorganisasian ini ditetapkan untuk merancang dan menyusun kegiatan sehingga segala sesuatu berlangsung procedural, sehingga dapat berjalan dengan baik untuk segala kegiatan yang telah direncanakan. Pengorganisasian merupakan penyusunan struktur organisasi dan pengelompokan pelaku beserta tugas, dan tanggung jawab sehingga dapat bekerja untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

## 3. Pelaksana(Actuating)

Seorang manajer atau pemimpin dalam sebuah kegiatan pelaksanaan, melaksanakan suatu usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara menggiatkan unsur-unsur bawahannya supaya mau untuk bekerja dan dapat berusaha secara sungguh-sungguh dan giat.

## 4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan disini yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana apa belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

## 5. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris *evaluation* yang mempunyai arti penilaian. Evaluasi merupakan sebuah proses penilaian yang digunakan untuk mengambil keputusan yang menggunakan hasil pengukuran dan berpatokan terhadap tujuan yang telah dirumuskannya. Evaluasi

merupakan suatu kegiatan yang menilai, mengukur, dan membandingkan hasil kinerja dengan standart yang telah ditetapkan dalam planning, apakah sudah tepat dan sesuai atau belum atau justru malah mungkin menyimpang.(jeli koso, martha ogotan, n.d.)

### **1.6.2 BUMDes**

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, mengamanatkan bahwa disetiap desa dapat dibentuk BUMDes yang mana Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.(Yuliana, Indriastuti, & Mm, n.d.)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan dalam pasal 132 PP Desa bahwa pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa yang kemudian hasil dari musyawarah tersebut yang ditetapkan dalam Peraturan Desa, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat telah disahkannya kesepakatan dalam musyawarah desa dan kesepakatan tersebut ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa.

Status BUMDes sebagai badan hukum dikukuhkan melalui undang-undang, namun sebagai badan hukum, ia harus memiliki organisasi yang teratur. Organisasi yang teratur ini dapat dilihat dalam pasal 132 PP Desa yang menyebutkan bahwa BUMDes setidaknya harus terdiri dari : a) Penasehat; dan b) Pelaksana Operasional secara ex-officio yang dijabat oleh Kepala Desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan organisasi BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan yang terdiri dari penasehat, dan pelaksana operasional. Penasehat secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa, sedangkan pelaksana operasional adalah perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.(HW, 2019)

BUMDes juga dapat dikatakan sebagai suatu lembaga ekonomi yang usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan yang menganut asas mandiri. Walaupun demikian, BUMDes tidak dapat menutup kemungkinan untuk dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintahan Desa atau pihak lain. BUMDes berfungsi dapat memwadahi berbagai usaha yang dikembangkan di sebuah pedesaan. Oleh karena itu, unit usaha yang ada di dalam BUMDes yang berbeda-beda, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yaitu terdiri dari :

1. Unit Produksi
2. Unit Jasa Keuangan
3. Unit Perdagangan.(Fatkhurohman, n.d.)

## 1.7. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi karakteristik yang didasarkan pada sesuatu yang di identifikasikan. Kunci dari definisi operasional itu sendiri dari suatu karakteristik atau keunikan yang dapat diamati, maksudnya dapat di amati yaitu peneliti untuk melakukan observasi secara cermat terhadap obyek yang berjudul Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Margo Mulyo” Di Desa Ngindeng adalah suatu proses pengolaan BUMDes yang dilakukan Pemerintahan Desa dan pengurus atau pengelola BUMDes. Untuk memilih permasalahan dalam sebuah penelitian ini secara jelas diperlukannya pendefinisian variabel secara operasional sebagai berikut :

- a. Strategi pengelolaan BUMDes adalah menurut pasal 25 Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa strategi pengelolaan BUMDes bersifat bertahap dengan mempertimbangkan dari inovasi. Strategi tersebut yaitu sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDes, pendirian BUMDes yang menjalankan bisnis sosial (social business), dan bisnis penyewaan (renting), dan usaha pengembangan kerjasama kemitraan strategis.(Wahyu Sumarno, 2018)

## 1.8. Metodologi Penelitian

### 1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptifkualitatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada dilokasi.Dalam penelitian

deskriptif ini merupakan penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa, gejala, dan kejadian yang terjadi sekarang ini.

#### 1.8.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

#### 1.8.3. Objek Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan objek penelitian mengkaji pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “ Margo Mulyo” berdasarkan AD ART Badan Usaha Milik Desa “Margo Mulyo” Desa Ngindeng Tahun 2016.

#### 1.8.4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi narasumber atau informan yang mampu memberikan data sesuai dengan yang diteliti yaitu pengurus/pengelola BUMDes “ Margo Mulyo”, Kepala Desa Ngindeng, Sekretaris Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo.

#### 1.8.5. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang melalui observasi, wawancara, dan analisis data.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi meliputi: Peraturan Desa No. 7 Tahun 2016 Desa Ngindeng tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), AD ART BUMDes “ Margo Mulyo” Desa

Ngindeng Tahun 2016 sebagai panduan pengelolaan, jurnal atau artikel yang membahas tentang BUMDes dan literatur-literatur lainnya.

#### 1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Antara lain :

##### a. Observasi

Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilakukan observasi berguna untuk mendapatkan data terkait dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan, menjawab pertanyaan dan melakukan evaluasi. Observasi paling penting dilakukan untuk mengetahui kondisi ekonomi serta kondisi Badan Usaha Milik Desa “Margo Mulyo” di Desa Ngindeng. Tujuannya untuk memperoleh data-data yang sulit didapatkan dengan metode lain. Observasi dapat dilakukan dengan peneliti sebagai partisipan.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh informasi. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada Pengelola BUMDes “Margo Mulyo”, Kepala Desa Ngindeng dan Sekretaris Desa Ngindeng. Kemudian peneliti hanya menyiapkan inti-inti permasalahan yang akan ditanyakan dan mengembangkannya sesuai respon narasumber. Tujuan untuk melakukan wawancara secara mendalam adalah untuk memperoleh data yang detail dan langsung dari narasumber. Data-data yang diperoleh dari

hasil wawancara merupakan data yang mengenai pengelolaan sebuah Badan Usaha Milik Desa.

c. Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji atau memahami data-data sekunder dengan bertumpu pada buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dan pencatatan data sekunder tentang peristiwa yang sudah terjadi. Di dalam memakai metode dokumentasi peneliti melihat seperti buku-buku, gambar, peraturan-peraturan, audio (rekaman) dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya Peraturan Desa atau AD ART yang mengatur tentang Pembentukan BUMDes dan Pengelolaan BUMDes. Kemudian peneliti akan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang diambil dari beberapa literatur untuk memperkuat data utama serta dapat memperkuat analisis data-data yang tersedia. (HW, 2019)

1.8.7. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses pengorganisasian dan mengurutkan hasil data ke dalam pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang dapat dirumuskan. Pengelolaan data atau menganalisis data adalah tahap yang penting dan penentuan, karena tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil disimpulkan kebenaran-kebenarannya yang diinginkan dalam sebuah penelitian.

Dalam menganalisis data, penulis atau peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana teknik ini penulis menggunakan untuk

menggambarkan, menuturkan melukiskan serta digunakan untuk menguraikan data yang bersifat kualitatif yang telah penulis peroleh dari hasil metode pengumpulan data. Menurut Seiddel proses menganalisis data kualitatif yaitu sebagai berikut :

1. Mencatat sesuatu yang dihasilkan dari catatan lapangan, kemudian diberi kode agar sumber datanya tetap bisa ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, dan mengklasifikasikannya.
3. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Pada analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu menggunakan data analisis interaktif. Dimana dalam model ini menggunakan tiga cara analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data adalah suatu kegiatan merangkum, memilih data yang penting, data yang dicari serta data yang sesuai dengan tema.
2. Penyajian data yaitu uraian singkat atau bagan atau penyajian data dalam bentuk uraian naratif. Hal ini relatif lebih memudahkan dalam memahami apa yang terjadi serta langkah apa yang harus dikerjakan selanjutnya sesuai dengan apa yang dipahami.
3. Penarikan kesimpulan yaitu deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. (Vereira, 2018).